

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kornelia (2016), tentang kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan strategi pengembangan (studi kasus di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur). Diperoleh hasil bahwa kabupaten sikka memiliki 2 subsektor perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hasil perikanan tangkap mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Total produksi perikanan tangkap selama 5 tahun terakhir 2010-2014 adalah sebesar 59.198 ton dan nilai produksi sebesar Rp. 699.263.520,-. Sedangkan total produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir (2010-2014) adalah sebesar 4.282 ton dan nilai produksi sebesar Rp. 15.777.788.000. Untuk kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Sikka adalah sebesar 11.02% selama 5 tahun (2010-2014) sebesar Rp. 4.875.115.000. dan PAD Kabupaten Sikka sebesar Rp. 231.872.591.798.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanida (2014), dengan judul penelitian Analisis potensi perikanan dan hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki 2 subsektor perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan tangkap yang diperoleh dari waduk ataupun sungai dengan jumlah 196,90 ton/tahun. Potensi perikanan air tawar pada kolam dengan nilai produksi sebesar 15.550,40 ton/tahun dengan keramba 1,3 ton/tahun. Kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Jombang dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar Rp. 34.745.360,00 atau sebesar 0,000296% dari keseluruhan PAD Kabupaten Jombang. Hasil kontribusi sektor perikanan mempunyai nilai yang kecil jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada di kabupaten Jombang.

2.2 Sumberdaya Perikanan

Indonesia berada di posisi 94° 40' BT – 141° BT dan 6° LU – 11° LS, terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; dan antara Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak di atas tiga lempeng aktif yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, dan garis pantai sepanjang 81.290 km, yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km², dengan wilayah daratan seluas 1.860.359,67 km².

Perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian yang penting bagi Indonesia saat ini. Sumberdaya perikanan di suatu perairan selalu dikaitkan dengan produksi, hasil tangkapan per unit usaha dalam kegiatan perikanan tangkap. Menurut Dirjen Perikanan Tangkap (2003) perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas.

Pemanfaatan sumberdaya (produksi) ikan terkait dengan kelestarian sumberdaya perikanan, maka semua kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Ketentuan Umum Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan, perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha bidang perikanan di bidang perikanan dengan tetap memelihara kelestarian sumberdaya perikanan yang ada sampai saat ini.

Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kekerangan termasuk rumput laut (Barani, 2004).

2.3 Sektor perikanan, Potensi Perikanan dan Kelautan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009, Tentang Perikanan yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sektor perikanan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil sumberdaya perikanan baik untuk perikanan laut maupun perikanan darat, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi.

Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut (1998) melaporkan bahwa potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia adalah sebesar 6.167.940 ton per tahun dengan terbesar dengan jenis ikan pelagis kecil yaitu sebesar 3.235.500 ton per tahun atau sebesar 52,54 persen, jenis ikan demersal 1.786.350 ton per tahun atau 28.96 persen dan perikan pelagis besar sebesar 975.050 ton atau sebesar 15,81 persen. Komoditi perikanan yang bernilai tinggi lainnya, seperti kepiting bakau dan rajungan, secara geografis dapat ditemui di seluruh perairan Indonesia. Secara keseluruhan, baik di perairan teritorial maupun ZEE, diperkirakan ada sekitar 6,1 juta ton ikan yang dapat ditangkap secara lestari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi ini sudah sudah sekitar 60%. Persentase ini sebenarnya sudah merupakan lampu kuning karena berdasarkan tanggung jawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization (FAO) dan Code of Responsible Fisheries (CCRF),

hanya sekitar 80% ikan yang boleh ditangkap. Itu berarti hanya tersisa ruang sekitar 20% penambahan produksi pengkapan ikan sepanjang tahun

2.4 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Keuangan daerah berasal dari otonomi daerah dan juga otonomi keuangan daerah yang sudah diatur dalam suatu daerah tersebut. Keuangan daerah diperoleh dari adanya sumberdaya alam dan pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut.

2.4.1 Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.4.2 Otonomi Keuangan Daerah

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah.

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah : Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah (Barata, 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah.

2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.6 Analisis Korelasi Potensi Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.6.1 Pengertian Analisis Korelasi

Menurut Arikunto (2013) koefisien korelasi adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Penelitian korelasional bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.

Korelasi Pearson Product Moment (PPM) sering disingkat Korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menghubungkannya. Besarnya angka korelasi disebut koefisien korelasi dinyatakan dengan lambang r .

2.6.2 Kegunaan Analisis Korelasi

Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat (timbal balik), melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Akibatnya, dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Data penyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas (independent) dan data akibat atau yang dipengaruhi disebut variabel terikat (dependent). Variabel bebas (independent) dilambangkan dengan huruf X atau $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ (tergantung banyaknya variabel bebas). Variabel terikat (dependent) dilambangkan dengan huruf Y .

Adapun kegunaan dari korelasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya.

2. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Dengan demikian, maka r^2 disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Hal ini disebabkan $r^2 \times 100\%$ terjadi dalam variabel terikat Y yang mana ditentukan oleh variabel X.

2.6.3 Rumus Analisis Korelasi

Untuk mengkaji koefisien korelasi antara potensi perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan digunakan persamaan (Kuswadi dan Mutiara 2004) sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

dimana:

x_1 = kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Bangkalan

y_1 = PAD Kabupaten Bangkalan

n = jumlah data

- ✓ Jika nilai korelasi = 0, maka sektor perikanan tidak mempunyai hubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Artinya apabila sektor perikanan menurun atau meningkat, itu tidak akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
- ✓ Jika nilai korelasi = +1, maka sektor perikanan mempunyai hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Artinya apabila sektor perikanan meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan juga meningkat. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan menurun, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan juga akan menurun.

✓ Jika nilai korelasi = -1, maka sektor perikanan mempunyai hubungan yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Artinya apabila sektor perikanan meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan akan menurun. Sebaliknya apabila sektor perikanan menurun maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan akan meningkat.

2.7 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor } x = \frac{\text{PAD sektor } x \text{ (Rp)}}{\text{PAD seluruh Kabupaten Bangkalan}} \times 100\%$$

Besar atau kecilnya tingkat kontribusi sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari perbandingan hasil kontribusi masing-masing sektor seluruh Kabupaten Bangkalan.

2.8 Strategi Pengembangan

Analisis yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan adalah analisis SWOT. Menurut Rangkuti (2009), analisis SWOT adalah analisis yang berguna untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat, dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal, yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Pembobotan dalam SWOT dilakukan dengan perhitungan terhadap point faktor yang dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian

terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan faktor lainnya, sehingga perhitungannya adalah nilai yang didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor) (Robinson dalam BPS, 2009).

Tahapan analisis SWOT dalam penyusunan perencanaan strategis, yaitu :

1. Tahapan pengumpulan data dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Data internal diperoleh dari lingkungan dalam usaha pengolahan hasil perikanan yang berupa kekuatan dan kelemahan dan data eksternal diperoleh dari lingkungan luar yang berupa peluang dan ancaman. Faktor ini dibuat dalam bentuk matriks *EFAS (External Factor Analysis Summary)* dan matriks *IFAS (Internal Factor Analysis Summary)*.
2. Tahap analisis : menganalisis *IFAS* dan *EFAS* dengan memberi bobot nilai selang 0-1, cara penentuan berdasarkan pengamatan lapangan untuk menentukan urutan prioritas yaitu faktor mana yang paling penting dan tidak penting. Penentuan bobot kriteria tersebut menggunakan metode pembobotan klasik dengan pemberian skor kepentingan 1, 3, 5, dan 7 (Marimin 2004). Pembobotan dengan menggunakan formula sederhana akan menghasilkan bobot antara sebesar 0-1 dan jika dijumlahkan keseluruhan bobot faktor tersebut akan menghasilkan nilai satu untuk masing-masing kondisi (internal dan eksternal). Selanjutnya memberi rating nilai dengan skala 1 sampai 4 dengan kualifikasi adalah nilai 1 = tidak tersedia, nilai 2 = kurang tersedia, nilai 3 = tersedia, dan nilai 4 = sangat tersedia. Pemberian nilai rating berbanding terbalik antara peluang dan ancaman dan kekuatan dan kelemahan. Semakin mendekati kenyataan, maka nilai peluang dan kekuatan semakin besar sehingga nilai kelemahan dan ancaman semakin kecil.

3. Setelah pemberian nilai dan bobot selanjutnya ditentukan nilai skor dengan mengalikan antara bobot dan rating
4. Pengambilan keputusan untuk perumusan strategi pengembangan pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan matriks *IFAS* dan *EFAS*, matriks tersebut menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu :
 - 1) Strategi SO (Kekuatan – Peluang) Strategi ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan peluang, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi ini disebut juga strategi agresif.
 - 2) Strategi ST (Kekuatan – Ancaman) Strategi yang menggunakan seoptimal mungkin kekuatan internal untuk menghadapi tantangan atau kelemahan. Strategi ini disebut strategi diversifikasi.
 - 3) Strategi WO (Kelemahan – Peluang) Strategi gabungan antara kelemahan dan peluang yang berupaya untuk meminimalkan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini disebut strategi *turnaround*.
 - 4) Strategi WT (Kelemahan – Ancaman) Strategi kombinasi antara kelemahan dan ancaman yang tidak menguntungkan dan berusaha meminimalkan kelemahan internal yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini disebut juga strategi defensif atau bertahan.

2.9 Kerangka Berpikir

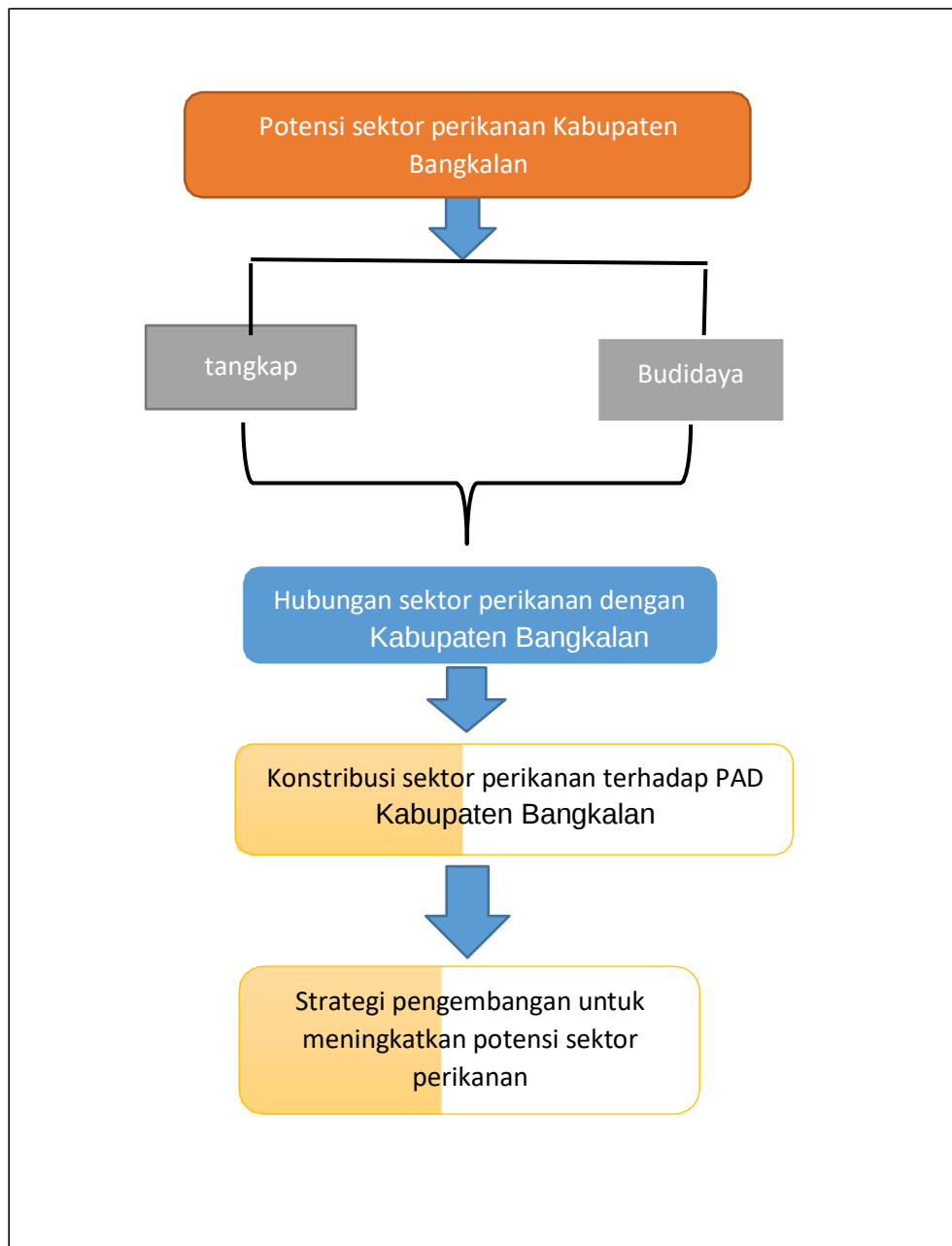
Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, tetapi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Bangkalan masih harus diteliti untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pengembangan sektor perikanan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Bangkalan.

Adanya pemikiran tentang kontribusi untuk pendapatan suatu daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar produksi perikanan yang dihasilkan tetapi juga harus dilihat dari sumbangan-sumbangan dari potensi sumberdaya yang ada di daerah terutama dalam bidang perikanan dan kelautan. Besarnya potensi perikanan akan menunjang perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah tersebut. Dengan adanya potensi perikanan di Kabupaten Bangkalan dan sumberdaya manusia yang cukup untuk mengelolanya maka dari itu diharapkan untuk dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Sebaiknya mengetahui terlebih dahulu bagaimana hubungan antara sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. Apakah hubungan korelasi ini 0,+1,atau -1. Untuk itu perlu diketahui seberapa besar yang disumbangkan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. PAD memiliki peran yang sangat penting dalam suatu daerah mengingat PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu tujuan dari pengembangan ini adalah untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan PAD. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang potensi perikanan

di Kabupaten Bagkanglan ini maka diberikan suatu strategi pengembangan yang ditujukan untuk dapat mengembangkan potensi sektor perikanan yang ada dengan menggunakan strategi analisis SWOT dan adanya suatu peran yang dapat diberikan masyarakat dan juga pemerintah pusat.

Pada gambar 1 dapat dilihat tentang kerangka berpikir.



Gambar 1. Kerangka Berpikir